

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

No	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab	U/C/C	Dampak	Pengendalian yang ada										Tingkat Risiko (TR)	Peringkat Risiko (PR)	RTP		Peringkat Risiko							
								Uraian	Desain Pengendalian					P	D	19	20												
A	T	TE	KE	E	10	11	12		13	14	15	16	17					18											
BIDANG SEKRETARIAT																													
I	Predikat SAKIP	Tercapainya Predikat SAKIP Dinas Nakerintans		Tidak tercapainya target yang telah di tentukan/ditargetkan			Predikat SAKIP tidak Tercapai																						
II	Nilai Reformasi Birokrasi	Tercapainya target Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Nakerintans		Tidak tercapainya Nilai Reformasi Birokrasi yang ditargetkan			Target Nilai Reformasi Birokrasi tidak tercapai																						
III	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Perangkat Daerah	Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik perangkat daerah		Tidak tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan																						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																													
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																													
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tidak tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Program dan kegiatan tidak terlaksanakan	C	Program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Rapat koordinasi di tingkat SKPD	V					V	3	2		6	Sedang	Rapat koordinasi di tingkat SKPD	Sub Program								
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Tidak tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD tidak dilaksanakan	C	Program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan dokumen RKA-SKPD	Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada sekretariat dan bidang harus sesuai dengan Dokumen RKA-SKPD	V					V	1	1		1	Sangat Rendah	Pelaksanaan Program dan kegiatan harus sesuai dengan Dokumen RKA-SKPD	Sub Program								
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Tidak tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD tidak dilaksanakan	C	Program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada sekretariat dan bidang harus sesuai dengan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	V					V	1	1		1	Sangat Rendah	Pelaksanaan Program dan kegiatan harus sesuai dengan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Program								
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD		Tidak tersedianya Dokumen DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD tidak dilaksanakan	C	Dokumen DPA-SKPD tidak tersedia, sehingga dapat menghambat proses realisasi anggaran	Dokumen DPA-SKPD harus disiapkan sebagai syarat pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran yang tersedia	V					V	1	1		1	Sangat Rendah	Pelaksanaan Program dan kegiatan harus sesuai dengan Dokumen DPA-SKPD	Sub Program								
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Tidak tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD tidak dilaksanakan	C	Dokumen Perubahan DPA-SKPD tidak tersedia, sehingga dapat menghambat proses realisasi anggaran pada program dan kegiatan yang mengalami perubahan	Dokumen Perubahan DPA-SKPD harus disiapkan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan yang mengalami perubahan	V					V	1	1		1	Sangat Rendah	Pelaksanaan Program dan kegiatan harus sesuai dengan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sub Program								
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tidak tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tidak diinput dari urusan sekretariat dan bidang	C	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tidak tersedia	Pengumpulan data Capaian kinerja dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dilaksanakan setiap Triwulan	V					V	3	3		9	Sedang	Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan sebelum masa triwulan berakhir dengan menyiapkan form penilaian capaian kinerja pada sekretariat dan bidang	Sub Program								



Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja, Pendidikan dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

No	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab	UCC	Dampak	Pengendalian yang ada										Tingkat Risiko (TR)	Peningkat Risiko (PR)	RTP		Pemilik Risiko			
								Uraian	Desain Pengendalian					P	D										
									A	T	TE	KE	E												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20					
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tidak terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak dilaksanakan	C	Informasi target dari hasil capaian kinerja pada sektoral dan bidang tidak tersampaikan dalam hal permasalahan dan solusi	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan setiap triwulan	V				V	2	2				Rendah	Pelaksanaan solusi pada permasalahan terhadap target kinerja yang belum tercapai dilakukan secara optimal	Sub Program				
2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																									
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Tidak tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyusunan DPA-SKPD belum terealisasi	C	Gaji dan Tunjangan ASN tidak terbayarkan	Penyusunan DPA-SKPD harus sesuai dengan jadwal	V				V	1	1				Sangat Rendah	Penyusunan DPA-SKPD harus sesuai dengan jadwal	Sub Keuangan				
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tidak tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan perjalanan dinas tanpa adanya undangan kegiatan	C	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN tidak tersedia	Pelaksanaan perjalanan dinas harus sesuai dengan undangan kegiatan dan kebutuhan OPD	V				V	1	1				Sangat Rendah	Pelaksanaan perjalanan dinas harus sesuai dengan undangan kegiatan dan kebutuhan OPD	Sub Keuangan				
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tertaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Tidak terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SK pengelola keuangan belum diterbitkan	C	Honor pengelola keuangan tidak bisa terealisasi	SK pengelola keuangan harus segera diterbitkan	V				V	1	1				Sangat Rendah	SK pengelola keuangan harus segera diterbitkan	Sub Keuangan				
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tidak tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan terdapat SKPD belum tersedia	C	Tidak adanya laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dibuat sesuai dengan jadwal	V				V	1	1				Sangat Rendah	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dibuat sesuai dengan jadwal	Sub Keuangan				
5	Pengelolaan dan Penyampaian Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Tidak tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan akan tersedia apabila ada temuan	C	Adanya rekomendasi teguran dari Tim Audit (BPK dan Inspektorat	Menyapkan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan apabila ada temuan	V				V	1	1				Sangat Rendah	Menyapkan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan apabila ada temuan	Sub Keuangan				
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Tidak tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD belum tersusun	C	Tidak adanya laporan keuangan akhir tahun SKPD	Menyapkan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD sesuai dengan jadwal	V				V	1	1				Sangat Rendah	Menyapkan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD sesuai dengan jadwal	Sub Keuangan				
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Tidak tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran belum tersusun	C	Tidak adanya laporan keuangan akhir tahun SKPD	Menyapkan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sesuai dengan jadwal	V				V	1	1				Sangat Rendah	Menyapkan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sesuai dengan jadwal	Sub Keuangan				
3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																									
1	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tertaksananya Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Tidak Tersedianya data kepegawaian	Tidak lengkapnya dokumen kepegawaian	C	Tidak terpakainya data kompetensi pegawai	Melengkapi dokumen kepegawaian	V				V	3	3				Sedang	Melengkapi dokumen kepegawaian	Sub Umum dan Aparatur				
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tertaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Pegawai yang profesional tanggap, dan berprestasi dalam menjalankan tugas kurang terbentuk	Adanya pegawai yang tidak berkompetensi, berdisiplin, dan berintegritas	C	Tidak tercapainya program kerja OPD	Pembinaan pegawai dan pengembangan karir dan kompetensi serta pemberian reward dan punishment	V				V	3	3				Sedang	Pembinaan pegawai dan pengembangan karir dan kompetensi serta pemberian reward dan punishment	Sub Umum dan Aparatur				
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sub Kegiatan	Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pegawai yang dilibatkan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan tidak mendapatkan hasil yang baik	Pegawai yang dilibatkan tidak memahami materi, sehingga berdampak pada implementasi pelaksanaan kegiatan OPD	C	Tidak tercapainya program dan kegiatan OPD	Pegawai yang dilibatkan harus memiliki integritas dan kemandirian yang tinggi melalui seleksi dari pegawai yang telah dididik OPD oleh pimpinan	V				V	3	3				Sedang	Mengirimkan pegawai berdasarkan hasil seleksi pimpinan untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pelatihan	Sub Umum dan Aparatur				



Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja, Pendidikan dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

No	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab	UCC	Dampak	Pengendalian yang ada										Tingkat Risiko (TR)	Peningkat Risiko (PR)	RTP (Rencana Tindak Pengendalian)	Pemilik Risiko
								Uraian	Desain Pengendalian					P	D						
A	T	TE	KE	E	10	11	12		13	14	15	16	17					18	19	20	

4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Surat menyurat dan administrasi lainnya tidak terbit	Kompetensi pegawai telereng tata kelola kearsipan masih rendah	C	Surat menyurat dan administrasi lainnya tidak terbit	Pembinaan peningkatan kompetensi pegawai melalui BIMTEK dan/atau pelatihan terkait administrasi umum	V					V	2	2			4	Rendah	Pembinaan peningkatan kompetensi pegawai melalui BIMTEK dan/atau pelatihan terkait administrasi umum		Sub Umum dan Aparatur
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tidak tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keterlambatan pembayaran		Kinerja Pegawai terganggu	Pembayaran tepat waktu	V					V	1	1			2	Sangat Rendah	Pembayaran tepat waktu		Sub Umum dan Aparatur
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tidak tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketertarikan Anggaran		Tidak bisa membuat laporan dan pelaksanaan kegiatan terganggu	Pemediaan anggaran yang cukup	V					V	1	1			2	Sangat Rendah	Alokasi anggaran sudah disiapkan		Sub Umum dan Aparatur
5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Tertaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Barang milik daerah dalam kondisi tidak baik/tidak layak pakai	Ketertarikan Anggaran		tingkat Mobilitas kegiatan CPD terganggu	Melakukan perbaikan terhadap Barang milik daerah secara rutin	V					V	4	4			16	Tinggi	melakukan Evaluasi terhadap Barang milik daerah		Sub Umum dan Aparatur
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bertaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Barang milik daerah dalam kondisi tidak baik/tidak layak pakai	Ketertarikan Anggaran		tingkat Mobilitas kegiatan CPD terganggu	Melakukan perbaikan terhadap Barang milik daerah secara rutin	V					V	4	4			16	Tinggi	melakukan Evaluasi terhadap Barang milik daerah		Sub Umum dan Aparatur
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya		Barang milik daerah dalam kondisi tidak baik/tidak layak pakai	Ketertarikan Anggaran		tingkat kinerja pegawai pada kegiatan CPD terganggu	Melakukan perbaikan terhadap Barang milik daerah secara rutin	V					V	4	4			16	Tinggi	melakukan Evaluasi terhadap Barang milik daerah		Sub Umum dan Aparatur
6 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																							
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tidak tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketertarikan Anggaran		Aktifitas pekerjaan pegawai terganggu	Pemediaan anggaran yang cukup	V					V	1	1			2	Sangat Rendah	Alokasi anggaran sudah disiapkan		Sub Umum dan Aparatur
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tidak tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketertarikan Anggaran		Aktifitas pekerjaan pegawai terganggu	Pemediaan anggaran yang cukup	V					V	1	1			2	Sangat Rendah	Alokasi anggaran sudah disiapkan		Sub Umum dan Aparatur
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Tidak tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Ketertarikan Anggaran		Kegiatan yang mengganggu peralatan rumah tangga terganggu	Pemediaan anggaran yang cukup	V					V	1	1			2	Sangat Rendah	Alokasi anggaran sudah disiapkan		Sub Umum dan Aparatur
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Tidak tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Ketertarikan Anggaran		Kegiatan penyusunan cetak dan penggandaan dokumen terganggu	Pemediaan anggaran yang cukup	V					V	1	1			2	Sangat Rendah	Alokasi anggaran sudah disiapkan		Sub Umum dan Aparatur
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tidak tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketertarikan Anggaran		Tidak bisa membuat pelaksanaan perjanjian dinas	Pemediaan anggaran yang cukup	V					V	1	1			2	Sangat Rendah	Alokasi anggaran sudah disiapkan		Sub Umum dan Aparatur



Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

No	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab	UC/C	Dampak	Pengendalian yang ada										Tingkat Risiko (TR)	Peringkat Risiko (PR)	RTP (Rencana Tindak Pengendalian)	Pemilik Risiko
								Uraian	Desain Pengendalian					P	D						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
BIDANG TENAGA KERJA																					
Tenaga Kerja yang Produktif		Persentase Tenaga Kerja yang Produktif		Tidak tercapainya Persentase Tenaga Kerja yang Produktif			Tenaga Kerja yang Produktif tidak tercapai														
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUCTIVITAS TENAGA KERJA																					
1 Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi																					
Siswa putus sekolah dan pengangguran sebagai pencari kerja dalam usaha produktif		Tercapainya Jumlah pencari kerja yang mendapat program pelatihan keterampilan berdasarkan unit kompetensi		Jumlah peserta pelatihan yang mendaftar melebihi target peserta pelatihan sesuai anggaran kompetensi		C	Jumlah peserta pelatihan yang mendaftar tidak semua terakomodir mendapatkan pelatihan		Memprogramkan kegiatan pelatihan dengan bertahap dan mencari tambahan anggaran pelatihan		V			V	4	4	16	Tinggi	Mencari tambahan anggaran pelatihan untuk menambah kuota jumlah peserta pelatihan, berkoordinasi dengan lembaga pelaksana pelatihan di luar wilayah Kabupaten Kapuas Hulu	Bidang Tenaga Kerja	
2 Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																					
LPK Binaan		Tercapainya Jumlah LPK yang dibina		Laporan tenaga kerja yang diaudit belum semua LPK melaporkan untuk setiap tahun		C	Tenaga kerja yang diaudit oleh LPK tidak terdapat		Mengirim surat kepada semua LPK terkait dengan pembaruan data peserta pelatihan		V			V	4	4	16	Tinggi	Turun langsung ke lapangan melakukan pembinaan terhadap LPK	Bidang Tenaga Kerja	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA																					
1 Kegiatan Pelayanan AntarKerja di Daerah Kabupaten/Kota																					
Pencari Kerja		Tercapainya Jumlah kartu pencari kerja yang diberikan dan lowongan kerja yang tersedia		Laporan tenaga kerja yang diaudit dan yang belum diaudit belum valid		C	Jumlah lowongan pekerjaan lebih sedikit daripada jumlah pencari kerja yang tersedia		Mencari informasi lowongan pekerjaan dan memfasilitasi pencari kerja melalui media media sosial		V			V	3	2	6	Rendah	Mengaji data Pencari Kerja dan lowongan pekerjaan yang sudah ada. Melakukan sosialisasi ke Perusahaan maupun Kecamatan terkait Layanan Antar Kerja	Bidang Tenaga Kerja	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL																					
1 Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																					
Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB ke Disnaker		Kepastian pengaluan syaria kerja		Struktur dan Skala Usaha masih belum menyesuaikan UMK Kabupaten		C	Masih terdapat perusahaan yang PPnya belum bisa disahkan		Melakukan usulan dalam beberapa kali upaya		V			V	2	2	4	Sangat Rendah	Sosialisasi syaria kerja ke perusahaan	Bidang Tenaga Kerja	
2 Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota																					
Pembinaan Kelengkapan ke Perusahaan dan Jumlah Kasus Penyelesaian Hubungan Industrial yang terfasiliasi		Membina dan menyelesaikan perselisihan		Pekerja belum memahami alur kelengkapan dan kasus untuk mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak		C	Hubungan Industrial tidak harmonis		Melakukan pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial		V			V	4	4	16	Tinggi	Pembinaan dan Penyelesaian Kasus Penyelesaian Hubungan Industrial di Perusahaan	Bidang Tenaga Kerja	

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

No	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab	UCC	Dampak	Pengendalian yang ada										Tingkat Risiko (TR)	Peringkat Risiko (PR)	RTP		Penilik Risiko		
			Uraian					Desain Pengendalian					P	D	(Rencana Tindak Pengendalian)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	T	TE	KE	E	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BIDANG PERINDUSTRIAN																								
	Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan		Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan tidak tercapai			Rendahnya pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan																	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI																								
1 Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																								
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																						
	Kegiatan pameran Inacraf	Mempromosikan produk unggulan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu		Harga produk relatif mahal sehingga tidak dapat bersaing dengan produk yang sama dari daerah lain		C	Produk unggulan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu lama terjual	Meningkatkan media promosi melalui media sosial dan berpartisipasi secara langsung pameran produk lokal daerah di tingkat nasional maupun internasional						V					3	3	9	Sedang	Meningkatkan media promosi melalui media sosial dan berpartisipasi secara langsung pameran produk lokal daerah di tingkat nasional maupun internasional	Bidang Perindustrian
	Bantuan Hilah Benang Tenun	Meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi kain tenun		Bahan baku benang tenun didatangkan dari luar daerah dan harga bahan baku mahal		C	Produktivitas dan kualitas produk kain tenun tidak meningkat	Memasarkan produk benang tenun di daerah yang di jual di daerah sendiri						V					3	3	9	Sedang	Penerapan teknologi pengganti bahan baku benang tenun seperti berbagai macam serat alam dan Memasarkan produk benang tenun di daerah yang di jual di daerah sendiri	Bidang Perindustrian
	Bantuan Hilah Peralatan Pertukangan	Meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi meubel		Kualitas alat pertukangan mudah rusak		C	Produktivitas dan kualitas produk meubel menurun	Pemeliharaan peralatan secara intensif						V					5	5	25	Sangat Tinggi	Monitoring dan evaluasi Kelompok IKM pengrajin pertukangan	Bidang Perindustrian
	Bantuan Hilah Peralatan Jamu Herbal	Meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi Jamu Herbal		Kualitas alat pengolahan bahan baku jamu herbal mudah rusak		C	Produktivitas jamu herbal terhambat	Pemeliharaan peralatan secara intensif						V					5	5	25	Sangat Tinggi	Monitoring dan evaluasi Kelompok IKM pengrajin jamu herbal	Bidang Perindustrian
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																						



Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja, Petindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

No	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab	UCC	Dampak	Pengendalian yang ada										RTP	Penilik Risiko					
								Uraian		Desain Pengendalian					P	D	Tingkat Risiko (TR)			Peringkat Risiko (PR)	(Rencana Tindak Pengendalian)			
										A	I	TE	KE	E										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	Verifikasi data pelaku Industri Kecil Menengah (IKM)	Pendataan dan verifikasi data Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM)		Tidak tersedianya data IKM yang akurat	Pelaku IKM tersebar di 23 kecamatan dan memerlukan biaya yang cukup besar	C	Data IKM Kapuas Hulu tidak akurat	Mempaparkan surat permohonan data IKM yang ada di Desa melalui Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu	V				V	3	3	9	Sedang	Mempaparkan surat permohonan data IKM yang ada di Desa melalui Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu dan Mengajukan data yang diberikan oleh Dinas PMP-TSP Kabupaten Kapuas Hulu	Bidang Petindustrian					
	Monitoring dan evaluasi Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM)	Pembinaan dan penyuluhan kepada Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Kapuas Hulu tidak terjangkau semua		Pembinaan dan penyuluhan kepada Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Kapuas Hulu tidak terjangkau semua	Pelaku IKM tersebar di 23 kecamatan dan memerlukan biaya yang cukup besar	C	Pembinaan dan penyuluhan kepada Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) tidak tercapai	Melakukan Pembinaan dan penyuluhan kepada Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dengan dana yang tersedia	V				V	3	3	9	Sedang	Melakukan Pembinaan dan penyuluhan kepada Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dengan dana yang tersedia	Bidang Petindustrian					
BIDANG TRANSMIGRASI																								
	Peningkatan Warga Transmigrasi yang Mandiri	Persentase Peningkatan Warga Transmigrasi yang Mandiri		Peningkatan Warga Transmigrasi yang Mandiri tidak tercapai			Warga Transmigrasi yang Mandiri tidak meningkat																	
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI																								
1	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Bersal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																							
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Bersal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terealisasi/terpilihnya pemecahan lahan yang masuk dalam kawasan hutan dan gambut dan terselenggaranya Sertifikat Hak Milik (SHM) yang belum diterbitkan di lokasi kawasan Permukiman Transmigrasi.		Pemecahan Pemecahan lahan dan transmigrasi yang masuk dalam kawasan hutan dan gambut, melakukan kewenangan pusat (Kementerian LHK, sehingga perlu adanya koordinasi yang intensif antar instansi terkait baik tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Untuk pemecahan penyelesaian pemecahan sertifikat menjadi kewenangan BPN Pusat, Provinsi dan Kantor Perencanaan sehingga perlu dilakukan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait.	Pemecahan tanah di Unit Permukiman Transmigrasi tidak terselenggarakan karena masuk dalam kawasan hutan dan gambut serta di okupasi masarakat karena pemukiman desa sehingga untuk pemberian sertifikat harus APL, Clear dan Clean	C	Lahan warga transmigran yang masuk dalam kawasan hutan dan gambut tidak dapat diberikan sertifikat oleh instansi terkait (BPN)	Membuat usulan dan permohonan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan dan gambut sehingga status lahan transmigrasi menjadi APL sehingga Sertifikat Hak Milik Warga Transmigrasi dapat diusulkan ke Kantor pertanahan untuk diterbitkan sertifikatnya.	V				V	4	5	20	Sangat Tinggi	Membuat usulan dan permohonan kepada BPN Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dikeluarkan lahan transmigrasi dari kawasan hutan dan gambut menjadi status APL. Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi dengan insas sektoral terkait kawasan hutan dan gambut.	Bidang Transmigrasi					
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI																								
1	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemahandiran																							
	1 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kemandirian dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Meningkatkan Penghasilan dan keterampilan masyarakat transmigrasi		Masih rendahnya penghasilan dan keterampilan warga transmigran sehingga penguatan infrastruktur, sosial budaya, ekonomi dan kemandirian tidak dapat berjalan secara efektif	Minimnya penghasilan dan keterampilan warga transmigran	C	Perkonomian tidak berkembang, keberagaman kurang berjalan efektif, sosial budaya berjalan sewaktu-waktu saja sehingga kemandirian transmigrasi tidak meningkat.	Meskipun kegiatan pembinaan dan pelatihan serta melaksanakan pelatihan pengetahuan dan keterampilan warga transmigran	V				V	3	4	12	Sedang	Memberikan penyuluhan, Pelatihan bagi warga transmigran						



Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

No	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab	UC/C	Dampak	Pengendalian yang ada										Tingkat Risiko (TR)	Peringkat Risiko (PR)	RTP	Penilik Risiko			
								Uraian																
								Desain Pengendalian					Efektivitas Pengendalian									P	D	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	T	TE	KE	E	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Formulir register risiko merupakan gabungan formulir identifikasi risiko dan analisis risiko.

Petunjuk pengisian

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan utama.
- Kolom (3) diisi tujuan kegiatan.
- Kolom (4) diisi dengan kode/nomor risiko.
- Kolom (5) diisi dengan pernyataan risiko potensial yang diidentifikasi dapat berdampak terhadap pencapaian tujuan.
- Kolom (6) diisi dengan penyebab/penicu terjadinya risiko tersebut.
- Kolom (7) diisi dengan penyebab apakah *Uncontrollable* (UC) atau *Controlable* (C) bagi unit kerja.
- Kolom (8) diisi dengan uraian dampak jika risiko kolom (5) terjadi.
- Kolom (9) diisi uraian/nama kegiatan pengendalian yang sudah ada (termasuk juga *compensating control*, jika ada).
- Kolom (10) diisi tanda *tickmark* (V), jika ada kegiatan pengendalian tersebut dalam kolom (9).
- Kolom (11) diisi tanda *tickmark* (V), jika tidak ada kegiatan pengendalian.
- Kolom (12) diisi tanda *tickmark* (V), jika kegiatan pengendalian yang ada tidak efektif mengurangi risiko.
- Kolom (13) diisi tanda *tickmark* (V), jika kegiatan pengendalian kurang efektif mengurangi risiko.
- Kolom (14) diisi tanda *tickmark* (V), jika kegiatan pengendalian yang ada telah efektif mengurangi risiko.
- Kolom (15) diisi dengan tingkat probabilitas (P), yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko. Tingkat kemungkinan terjadinya risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD).
- Kolom (16) diisi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat besaran dampak jika risiko terjadi. Tingkat dampak risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD).
- Kolom (17) diisi dengan tingkat risiko (TR), yaitu perhitungan antara probabilitas dan dampak.
- Kolom (18) diisi dengan peringkat risiko, arakan rendah, sedang, moderat, tinggi atau ekstrim.
- Kolom (19) diisi Rencana Kegiatan Pengendalian apabila Desain Tidak ada Kolom 5 terapan Tidak Efektif (TE) atau Kurang Efektif Kolom 7 dan 8 di "Tickmark" (V)
- Kolom (20) diisi dengan siapa yang bertanggung jawab atas risiko (pemilik risiko).